



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2019/Periodik - 2018)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
**UNIT KERJA** : PIMPINAN TERTINGGI  
**SUB UNIT KERJA** : KEPALA LEMBAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AHMAD MARZUQI
2. Jabatan : BUPATI JEPARA
3. NHK : 46774

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp.

1.235.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 257 m<sup>2</sup>/54 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 525 m<sup>2</sup>/64 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 2220 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 3686 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1085 m<sup>2</sup>/650 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 1095 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
7. Tanah Seluas 2800 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp.

85.000.000

1. MOTOR, KAWASAKI NINJA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 51.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOTOR, YAMAHA N-MAX SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	154.850.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	30.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.474.880.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.474.880.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **30 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.